

BeritaSatu Photo/Emral Firdiansyah



MyPertamina

Pelanggan SPBU Pertamina memanfaatkan My Pertamina untuk membayar tagihan pembayaran pengisian bahan bakar kendaraan, di Jakarta, Selasa (16/3/2021). Bertepatan dengan Hari Hak Konsumen Sedunia yang jatuh pada 15 Maret 2021, PT Pertamina (Persero) mencatat jumlah pengguna aplikasi MyPertamina telah mencapai 10 juta. Hadirnya aplikasi tersebut merupakan wujud komitmen Pertamina dalam memenuhi hak konsumen dengan memperkuat layanan dengan memberi kemudahan transaksi secara digital.

Produksi Panas Bumi Pertamina Lampau Target

Oleh Retno Ayuningtyas

► JAKARTA – Di tengah pandemi Covid-19, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak perusahaan PT Pertamina (Persero) berhasil mencatatkan produksi panas bumi setara listrik sebesar 4.618 gigawatt hour (GWh) atau lebih tinggi 14% dari target tahun lalu 4.045 GWh. PGE menargetkan kapasitas pembangkit panas buminya dari saat ini 672 megawatt (MW) menjadi 1.112 MW pada 2026.

“Produksi setara listrik sebesar 14% lebih tinggi dari RKAP karena pembangkitan dan penyerapan yang optimal dari area panas bumi PGE,” kata Direktur Utama PGE Ahmad Yuniarto dalam keterangan resminya, Selasa (16/3).

Selain menjaga pasokan listrik dari pembangkit yang telah dioperasikan saat ini, lanjutnya, PGE juga melakukan kajian dalam rangka meningkatkan kapasitas terpasang panas bumi untuk pembangkitan energi listrik. Area yang menjadi fokus awal dalam kajian ini adalah Ulubelu di Lampung

dan Lahendong di Sulawesi Utara.

“Kami juga berharap kajian yang dilakukan untuk pengembangan wilayah kerja PGE dapat memberikan hasil yang positif untuk pengembangan panas bumi di Indonesia,” tambah Ahmad.

Belum lama ini, PGE mendapat wilayah kerja panas bumi (WKP) baru dari pemerintah yang berlokasi di Kotamobagu, Sulawesi Utara. Sehingga, PGE mengelola total 15 blok panas bumi. Rincinya, Seulawah di Aceh, Sibayak dan Sarulla di Sumatera Utara, Hululais di Bengkulu, Sungai Penuh di Jambi, Lumut



Ahmad Yuniarto

Balai di Sumatera Selatan, Ulubelu di Lampung, Gunung Salaj, Wayang Windu, Drajat, Kamojang, dan Karaha di Jawa Barat, Gunung Lawu di Jawa Tengah, Bedugul di Bali, serta Lahendong di Sulawesi Utara.

Ahmad melanjutkan, blok panas bumi yang dikelola pihaknya berkontribusi sekitar 88% dari total kapasitas terpasang panas bumi di Indonesia. “PGE terus berkomitmen untuk meningkatkan energi terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 23% pada 2025, khususnya dari energi panas bumi,” ungkapnya.

Dari 15 blok panas bumi yang dikelola PGE, total pembangkitan energi listriknya mencapai 1.877 MW, yakni 672 MW dioperasikan

sendiri oleh PGE dan 1.205 MW dikelola melalui Kontrak Operasi Bersama. Ke depannya, PGE akan menargetkan pembangkit listrik panas bumi (PLTP) yang dikelolanya dapat meningkat menjadi 1.112 MW pada 2026.

Mengacu data PT Pertamina Power Indonesia (PPI), kebutuhan investasi untuk pengembangan kapasitas panas bumi hingga 1.112 MW ini diperkirakan mencapai US\$ 2,9 miliar untuk 2020-2026. Namun, dengan pengembangan ini, PPI berpotensi memperoleh pendapatan hingga US\$ 5,9 miliar.

Masih berdasar data yang sama, saat ini terdapat beberapa area panas bumi dengan kapasitas total 495 MW yang tengah dikembangkan. Tiga wilayah diantaranya masih dalam tahap eksplorasi, yaitu Suelawah, Hululais Extension, dan Gunung Lawu. Dua blok panas bumi lain yang dikembangkan adalah Sungai Penuh 55 MW dan Hululais 2x55 MW.

Secara total, portofolio kelistrikan dan energi baru terbarukan (EBT) Pertamina bisa naik sebesar 40 GW di 2026. Penambahan kapasitas ini didorong oleh pengembangan pembangkit listrik energi surya, biomass, biogas, air, angin, dan bahan bakar nabati (BBN) sebesar 3,4 gigawatt (GW), pembangkit energi bersih seperti gas 5,7 GW, pabrik baterai 30,2 GWh, termasuk panas bumi 1,1 GW.

Pengamat Nilai Co-firing PLTU Berpotensi Timbulkan Beban Keuangan

JAKARTA – Rencana penerapan co-firing atau penggunaan biomassa sebagai campuran bahan bakar di PLTU berpotensi menjadi beban keuangan bagi PT PLN (Persero) atau negara lantaran harga biomassa yang tinggi di pasar. Padahal, rencana ini bukan solusi tepat untuk mencapai target bauran energi 23% di 2025.

Analisis Keuangan Energi Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Putra Adhiguna mengatakan, harga biomassa berkualitas tinggi di pasar saat ini lebih mahal daripada batu bara. Padahal, untuk batu bara pun, PLN membelinya pada harga yang lebih rendah dari harga ekonominya. Sehingga, rencana co-firing ini berpotensi menimbulkan risiko keuangan bagi PLN.

“Untuk PLN, [co-firing] akan meningkatkan risiko keuangan PLN. Saya belum lihat bagaimana [co-firing]



Putra Adhiguna

hingga 9 juta ton tanpa dukungan pemerintah bisajalan,” kata dia dalam diskusi yang digelar Yayasan Indonesia Cerah dan IEEFA, Selasa (16/3).

Harga biomassa yang cukup tinggi ini untuk pelet kayu. Diakui, beberapa jenis biomassa lain, seperti serbuk gergaji, harganya

cukup murah. Namun, kandungan kalori dari biomassa jenis ini cukup rendah. Pelet kayu merupakan jenis biomassa yang kalorinya mendekati batu bara. “Harga dari biomassa ini tanpa ada dukungan subsidi tidak mungkin semurah yang diproyeksikan PLN,” ungkapnya.

Hal ini, sebut Putra, membuat rencana co-firing PLTU sangat bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah. Dia mencontohkan, Inggris pernah menjalankan co-firing di PLTU milik Drax ini. Namun, co-firing ini berhenti setelah Pemerintah Inggris mencabut subsidi. Hal ini juga membuat Drax sepenuhnya beralih ke biomassa dan mendapat subsidi £ 700 juta per tahun.

“Salah alasan pemerintah Inggris mencabut karena khawatir batu bara akan semakin banyak yang ‘tersubidi’ juga dengan co-firing,” jelasnya. Masalah harga ini juga sangat berkaitan dengan jaminan pasok-

an. Saat ini, tambahnya, beberapa negara lain sudah siap membeli biomassa bahkan dengan harga dua kali lipat batu bara. Di Indonesia sendiri, meski memiliki potensi biomassa besar, kapasitas produksinya masih sangat sedikit.

Artinya, tutur Putra, dibutuhkan investasi besar untuk mendorong produksi biomassa sehingga bisa memenuhi kebutuhan PLN. Di sisi lain, proyeksi permintaan biomassa PLN yang tidak konsisten membuat investor ragu akan rencana co-firing ini. PLN menyatakan kebutuhan biomassa akan terus meningkat.

“Sementara [porsi batu bara] PLN dan IPP [independent power producer/produser listrik swasta] sudah terbalik. Kecil sekali [kebutuhan biomassa] kalau pembangkit PLN. Tetapi IPP tidak mudah mau terapkan co-firing, akan ada perdebatan kontraktual pembangkit memakai biomassa,” jelas Putra. (es)

Menteri ESDM: Transisi Energi Perlu Libatkan Masyarakat

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa transisi energi sangat krusial dalam memastikan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Untuk mencapainya, perlu adanya keterlibatan masyarakat.

Hal itu dinyatakan Arifin dalam gelaran *Global Commission on People-Centred Clean Energy Transitions* yang diselenggarakan oleh International Energy Agency (IEA). Pada kesempatan tersebut, Arifin mengatakan bahwa agenda ini penting, tidak hanya untuk mempercepat pengurangan emisi,

namun juga untuk melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam proses transisi energi.

“Transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan harus memastikan aksesibilitas, keterjangkauan, ketersediaan, kesetaraan, dan keandalan energi bersih,” kata di Jakarta, Selasa (16/3).

Menurut dia, Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan transisi energi yang melibatkan masyarakat, yang sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan yang pertama adalah reformasi subsidi energi, sekaligus menjaga keterjangkauan

dan keamanan pasokan energi.

“Indonesia telah bertransformasi dari rezim subsidi energi yang tidak efisien dan membebani menjadi kebijakan yang lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan lebih banyak sumber energi dalam negeri terutama gas alam dan energi terbarukan untuk mengurangi masalah neraca perdagangan,” tutur Arifin.

Di samping itu, pemerintah juga telah menjalankan program mandatori biodiesel 30 persen (B30). Program ini sangat penting untuk mengurangi impor bahan bakar fosil. Pemerintah tidak hanya memanfaatkan kelapa sawit sebagai sumber bahan bakar

nabati sebagai alat untuk mengurangi emisi, tetapi juga mencari peluang untuk pembangunan ekonomi yang lebih besar.

“Target transisi energi kami ditetapkan dengan target yang ambisius menuju energi bersih. Saat ini Indonesia tengah mengembangkan co-firing biomassa pada beberapa pembangkit listrik, dan berusaha untuk memperluas skala penggunaan teknologi ini. Kami juga mengevaluasi potensi kombinasi antara clean coal technology, co-firing biomassa, dan CCS/CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage),” jelas Arifin. (es)

PLN Gencar Lakukan Riset untuk Pembangkit Ramah Lingkungan

JAKARTA – Sebagai salah satu unit PLN yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur kelistrikan, meliputi transmisi dan pembangkit, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (PLN UIP JBB) sangat mendukung terhadap pengembangan pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT). Saat ini PLN tengah gencar melakukan riset untuk menambah jumlah pembangkit yang ramah lingkungan.

“Kami sangat mendukung pengembangan dan pemanfaatan EBT di wilayah kerja kami. Karena memang membawa manfaat besar dan dampak yang sangat minimal terutama untuk lingkungan,” kata General Manager PLN UIP JBB Ratnasari Samsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/3).

Ratnasari menuturkan saat ini PLN memang tengah gencar melakukan riset untuk menambah jumlah pembangkit yang menggunakan energi dari alam. “Saat ini kami sedang menjalankan studi kelayakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di salah satu wilayah kerja kami, yaitu di Banten,” tuturnya.

Studi kelayakan ini bertujuan untuk menilai apakah wilayah yang dimaksud memiliki potensi untuk menjadi rumah bagi pembangkit yang menggunakan energi dari angin tersebut. “Karena pembangkit ini menyangkut keperluan banyak orang, dan akan digunakan dalam waktu yang sangat lama, sehingga untuk studinya membutuhkan banyak tahapan dan riset yang mendalam,” jelas Ratnasari.

Dia mengungkapkan tantangan paling utama adalah dalam hal masih tingginya biaya pengembangan dan biaya pokok produksi dari pembangkit EBT. “Bahkan lebih tinggi dibandingkan membangun pembangkit konvensional,” ujarnya. Selain itu, karakteristik pembangkit EBT sangat bergantung dengan alam, sehingga perlu ditinjau kembali kesiapannya untuk dijadikan sumber utama produksi listrik. “Itu sebabnya, teknologi yang tepat dan terjangkau perlu digunakan untuk menjawab kondisi tersebut,” imbuh Ratnasari.

Kendati dihadapkan dengan berbagai kendala di lapangan terkait pembangunan pembangkit EBT, Ratnasari mengungkapkan optimismenya bahwa



Ratnasari Samsuddin

PLN akan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk mewujudkannya. “Ini dibuktikan dengan target PLN untuk meningkatkan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) menjadi 1297 MW di tahun 2030. Angka ini dua kali lipat lebih besar dari kapasitas saat ini yaitu 572 MW,” ujar Ratnasari. Menurutnya, ini merupakan bentuk komitmen PLN terhadap lingkungan.

Sebagai negara yang memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, PLN melihat ini sebagai peluang untuk mengembangkan pembangkit dengan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia. “Untuk pemilihan jenis pembangkit di semua wilayah tidak bisa disamaratakan, tergantung dari kesediaan sumber energi yang ada. Apakah suplai energi itu dapat terus tersedia sampai puluhan tahun mendatang,” papar Ratnasari.

Dia pun berharap agar semakin banyak pembangkit PLN yang menggunakan energi alam untuk memberikan listrik andal bagi masyarakat, terutama di wilayah kerja PLN UIP JBB, Jakarta dan Sebagian Banten serta Jawa Barat.

“Karena memang kita tidak bisa sepenuhnya dan selamanya bergantung pada sumber daya yang tidak dapat diperbarui, untuk produksi listrik. Konversi ke energi bersih dan ramah lingkungan perlu dilakukan demi Bumi kita,” ujarnya. (rap)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA



PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk
(Member of Sungai Budi Group)
Fully Integrated Palm Cooking Oil Producer
And Downstream Product And Fully Integrated Sugar Producer
("Perseroan")

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan di Hotel Westin - Ruang Padang J. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 A, RT 2/RW 5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 yang dimulai pada pukul 14.23 WIB sampai dengan pukul 14.56 WIB dalam rangka memenuhi Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK").

Rapat dihadiri oleh:

Dewan Komisaris : Oey Albert
Komisaris Independen : Justinus Aditya Siharta

Direksi

Wakil Presiden Direktur : Sudarno Tasmis
Direktur : Djunaidi Nur
Oey Alfred

Pemegang Saham Yang Hadir Dalam Rapat

- Eisa Gunawan selaku kuasa dari :
 - Widarto selaku pemilik 2.338.000 saham.
 - Santoso Winata selaku pemilik 2.338.000 saham.
- James Indrianto Winata selaku kuasa Direksi dari :
 - PT Budi Delta Swakarya selaku pemilik 1.452.246.896 saham.
 - PT. Sungai Budi selaku pemilik 1.499.929.596 saham.
- Masyarakat (Publik) selaku pemilik 1.588.883.520 saham.

Pemegang Saham

Para pemegang saham yang hadir dalam Rapat yaitu para pemegang saham yang mewakili sejumlah 4.545.736,012 saham atau sebesar 99,14% dari total saham yang mempunyai hak suara yang sah dalam Rapat yaitu 5.276.846.539 saham.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan perundang-undangan di Pasar Modal, Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Membatalkan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat tanggal 28 Januari 2021.
- Melakukan pengumuman Rapat melalui iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian "Investor Daily", situs Bursa Efek Indonesia (BEI), situs Perseroan (www.tunasbarulampung.com) dan situs web penyedia E-RUPS melalui aplikasi eASYKSEI pada tanggal 04 Februari 2021.
- Melakukan pengumuman atas Keterangan Informasi sehubungan dengan agenda pertama dan kedua Rapat melalui iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian "Investor Daily" pada tanggal 04 Februari 2021.
- Melakukan pengumuman Rapat melalui iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian "Investor Daily", situs Bursa Efek Indonesia (BEI), situs Perseroan (www.tunasbarulampung.com) dan situs web penyedia E-RUPS melalui aplikasi eASYKSEI pada tanggal 19 Februari 2021.

Melakukan pengumuman atas Perubahan dan/atau Informasi Tambahan atas Keterangan Informasi sehubungan dengan agenda pertama dan kedua Rapat melalui iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian Investor Daily pada tanggal 10 Maret 2021.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. Pemungutan suara juga akan dilakukan dengan memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui platform eASYKSEI.
- Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain akan diminta untuk mengangkat tangan.

Rapat diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut :

- Persetujuan atas penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebesar-besarnya USD 400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) oleh Perseroan, dengan bunga tetap dan akan jatuh tempo selambat-lambatnya pada tahun keluh sejak tanggal diterbitkannya atau dengan ketentuan dan persyaratan serta jangka waktu lain yang disepakati oleh para pihak yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau persetujuan atas rencana Perseroan, dalam kapasitas Perseroan sebagai pemegang saham, untuk memberikan persetujuan kepada entitas anak Perseroan untuk menjamin seluruh atau sebagian besar aset entitas anak Perseroan (jika diperlukan) termasuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dalam rangka rencana penerbitan surat utang sebagaimana dimaksud dalam agenda pertama Rapat.
- Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan, melaksanakan, menandatangani dan/atau

menyerahkan serta melaksanakan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk seluruh perubahan dan tambahan daripadanya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi, serta memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan untuk membuat dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melampirkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang dicekualikan.

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Agenda Rapat Pertama**
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : 0 saham
Hasil Pemungutan Suara :
 - Setuju : 4.545.736,012 saham atau 99,98% dari seluruh saham yang hadir/diwakili.
 - Abstain : 8.000 saham atau 0,00% dari seluruh saham yang hadir/diwakili.
 - Tidak Setuju : 911.800 saham atau 0,02% dari seluruh saham yang hadir/diwakili.

Keputusan Rapat :
Menyetujui rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebesar-besarnya USD 400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) oleh Perseroan, dengan bunga tetap dan akan jatuh tempo selambat-lambatnya pada tahun keluh sejak tanggal diterbitkannya atau dengan ketentuan dan persyaratan serta jangka waktu lain yang disepakati oleh para pihak yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

- Agenda Rapat Kedua**
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : 0 saham
Hasil Pemungutan Suara :
 - Setuju : 4.545.736,012 saham atau 99,98% dari seluruh saham yang hadir/diwakili.
 - Abstain : 8.000 saham atau 0,00% dari seluruh saham yang hadir/diwakili.
 - Tidak Setuju : 911.800 saham atau 0,24 % dari seluruh saham yang hadir/diwakili.

Keputusan Rapat :
Menyetujui pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau persetujuan atas rencana Perseroan, dalam kapasitas Perseroan sebagai pemegang saham, untuk memberikan persetujuan kepada entitas anak Perseroan untuk menjamin seluruh atau sebagian besar aset entitas anak Perseroan (jika diperlukan) termasuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dalam rangka rencana penerbitan surat utang.

- Agenda Rapat Ketiga**
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : 0 saham
Hasil Pemungutan Suara :
 - Setuju : 4.544.816,212 saham atau 99,98% dari seluruh saham yang hadir/diwakili.
 - Abstain : 8.000 saham atau 0,00% dari seluruh saham yang hadir/diwakili.
 - Tidak Setuju : 911.800 saham atau 0,02% dari seluruh saham yang hadir/diwakili.

Keputusan Rapat :
Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk seluruh perubahan dan tambahan daripadanya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi, serta memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan untuk membuat dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melampirkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang dicekualikan.

Jakarta, 17 Maret 2021
PT Tunas Baru Lampung Tbk
Direksi